

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kompleksnya masalah kemiskinan merupakan masalah yang bersifat universal, kemiskinan berhubungan dengan banyak kegiatan kehidupan sehingga usaha dalam memecahkan persoalan kemiskinan menjadi sulit. Pembangunan adalah fokus utama pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan perekonomian. Tujuan utama dalam pembangunan ialah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus pula diikuti dengan penghapusan atau juga penurunan tingkat pengangguran, kesenjangan pendapatan dan kemiskinan (Todaro, 2004:87).

Kemiskinan tidak hanya menjadi salah satu masalah terbesar di negara Indonesia saja, namun hampir setiap negara-negara berkembang sedang berjuang untuk meminimalkan jumlah kemiskinan di negaranya, selain itu kemiskinan ini juga dapat mempengaruhi keadaan pembangunan perekonomian suatu negara. Masalah kemiskinan adalah salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi di suatu negara. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang secara menyeluruh diperlukan adanya

pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata (Faisal, dkk. 2023).

Pembangunan ekonomi ialah salah satu pembangunan nasional yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. Suatu tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat dari aspek ekonominya yang diukur dengan pendapatan nasional perkapita. Proses pembangunan memiliki beberapa tahapan yaitu meningkatnya serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok, meningkatnya angka standar hidup dan meluasnya pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta secara keseluruhan (Todaro dan Smith, 2006).

Pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan serta kebutuhan masing-masing daerah. Pembangunan dimaksud tetap harus mengacu pada sasaran strategis nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang yang ingin dicapai. Kemiskinan adalah masalah global yang saat sekarang ini tengah dihadapi dan menjadi sebuah perhatian orang-orang di seluruh dunia. Kemiskinan bukan hanya menjadi perhatian utama di negara berkembang, tetapi juga menjadi perhatian negara-negara maju di dunia. Negara Indonesia adalah negara yang berkembang memiliki fokus untuk menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara komprehensif, meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Pengentasan kemiskinan akan menjadi salah satu indikator penting dari keberhasilan pembangunan. Istilah kemiskinan ini muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak sanggup untuk mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi

yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup (Husna, dan Muhammad, 2017).

Kemiskinan yang tinggi juga akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi (Darmawan dan Wenagama, 2017). Kemiskinan ialah suatu kondisi yang sering dikaitkan dengan kebutuhan, kesulitan, dan kekurangan seseorang. Menurut Rintuh (2003), kemiskinan dapat diartikan sebagai kesulitan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

Menurut Todaro (2012) permasalahan kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensi yakni persoalan yang apabila tidak diatasi maka akan mempengaruhi atau memunculkan masalah baru yang menyangkut banyak aspek sebab berhubungan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, dan tingkat kesehatan yang rendah. Banyaknya strategi pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan yaitu dengan mewujudkan melalui upaya menurunkan jumlah penduduk miskin, namun dalam realitasnya masih terdapat jarak antara harapan dan kenyataan di lapangan berupa kemiskinan.

Menurut Mudrajat Kuncoro (2010) terjadinya kemiskinan berasal dari teori Nurkse yaitu teori lingkaran kemiskinan (*Vicious circke of poverty*) dimana terdapat tiga penyebab utama yaitu: (i) Adanya keterbelakangan, dan ketertinggalan Sumber Daya Manusia (SDM), yang tercerminkan dari rendahnya

Indeks Pembangunan Manusia; (ii) ketidaksempurnaan pasar, dan (iii) kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktifitas. Pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi, dengan adanya pembangunan ekonomi maka dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi begitu juga sebaliknya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka dapat memperlancar pembangunan ekonomi (Hidayat, 2013).

Provinsi Riau adalah salah satu dari Provinsi yang dikenal dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah, seperti: minyak bumi, gas, dan minyak kelapa sawit, jumlah penduduk yang tinggi, pengelolaan pemerintah dalam pembangunan yang cukup baik, dan pemberantasan kemiskinan yang menjadi fokus utama pemerintah untuk memajukan daerah Provinsi Riau.

Dalam proses pengukuran tingkat kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan upaya dalam pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun kebutuhan dasar bukan makanan yang pengukurannya dilihat dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan di Provinsi Riau dapat dilihat dari grafik :

Grafik 1.1 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Di Provinsi Riau



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2023

Berdasarkan grafik 1.1 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau terjadi fluktuasi penurunan dan kenaikan. Akan tetapi, pada tahun 2017-2020 tingkat kemiskinan mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau sebesar 515,40 jiwa, Namun pada tahun 2017 sebesar 514,62 jiwa hingga tahun 2020 terus mengalami penurunan sebesar 483,39 jiwa. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau mengalami peningkatan sebesar 500,81 jiwa. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali sebesar 485,03 jiwa. Adanya penurunan angka kemiskinan di Provinsi Riau ini setiap tahunnya tidak terlepas dari semakin banyaknya program-program pemerintah untuk peningkatan perekonomian masyarakat baik itu yang berasal dari pusat seperti Program KUBE dan juga program yang berasal dari pemerintah Provinsi Riau. Kelompok Usaha Bersama atau yang lebih dikenal dengan Program KUBE. Program pengentasan kemiskinan KUBE adalah salah

satu lembaga keuangan mikro (LKM) yang sedang berkembang diberbagai Provinsi termasuk Riau (Zulkarnain et al., 2020). Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau mengalami peningkatan sebesar 500,81 jiwa. Peningkatan tersebut berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan pandemic Covid-19 terhadap perekonomian. Pandemi Covid-19 telah memukul sektor usaha di Provinsi Riau menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran dan turunnya jumlah pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah pengangguran maka dapat menyebabkan bertambahnya jumlah kemiskinan di Provinsi Riau (Rahmadeni et., 2022). Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali sebesar 485,03 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau dari tahun 2016-2022 mengalami fluktuasi penurunan dan kenaikan meskipun ditinjau secara keseluruhan jumlahnya menurun. Fluktuasi tersebut membuktikan bahwa pemerintah belum menangani permasalahan kemiskinan dengan optimal.

Dikutip dari Cakaplah.com (2023) menyatakan bahwa faktor penyebab tingkat kemiskinan di Provinsi Riau dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang turun, penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tingginya angka penduduk kerja terdampak pandemi dan PHK, faktor pendidikan, kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, keterbatasan sumber daya alam, dan kebijakan pembangunan. Oleh sebab itu, pada dasarnya kenaikan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau dari tahun 2016 hingga 2022 dapat disebabkan oleh sejumlah faktor kompleks. Pertama, fluktuasi harga komoditas seperti minyak dan gas, yang merupakan salah satu sumber pendapatan utama provinsi ini, dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi

daerah. Selain itu, dampak pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak 2020 juga telah merusak sektor ekonomi, mengakibatkan pengangguran dan penurunan pendapatan bagi banyak warga Riau. Selain faktor eksternal, perubahan dalam kebijakan pemerintah, seperti pengurangan bantuan sosial atau perubahan dalam alokasi anggaran, juga dapat berdampak pada kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau dari tahun ke tahunnya adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan yang memerlukan perhatian serius untuk mengatasi masalah tersebut.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, angka kemiskinan di Provinsi Riau secara umum terjadi fluktuasi turun naik dalam jumlah maupun persentase pada periode tahun 2016-2022. Hal tersebut beriringan dengan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Penurunan kemiskinan multidimensi di Indonesia tidak terlepas dari kontribusi program-program pembangunan yang dicadangkan oleh pemerintah. Sebagai contoh meningkatnya alokasi anggaran kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial turut mengakselerasi penurunan kemiskinan (Aidha et al., 2018).

Selain faktor jumlah penduduk miskin yang berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan, terdapat faktor kondisi PDRB yang lambat, dimana pada tahap awal pertumbuhan ekonomi distribusi pendapatan cenderung memburuk dan pada tahap selanjutnya cenderung membaik namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan disparitas pendapatan yang akhirnya pada suatu titik tertentu akan menurun kembali. Kondisi pertumbuhan ekonomi tentunya

tergantung dari kondisi PDRB yang dimiliki, diketahui pada 2016-2019 terjadi peningkatan PDRB di Provinsi Riau (Rachman, 2018).

Pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berkelanjutan menjadi penanggulangan pertama dari strategi penurunan kemiskinan. Pada umumnya, perekonomian dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan penggunaan sumber produksi yang meningkat efisiensinya, telah mengalami penurunan yang berarti dalam mengurangi tingkat kemiskinannya. Oleh karena itu, kebijaksanaan makro ekonomi sangat diperlukan dalam penurunan tingkat kemiskinan yang ditujukan untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi maupun kebijaksanaan sektoral yang dimaksudkan untuk memperbaiki sektor swasta secara menguntungkan. Semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin besar potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Jadi, dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan daerah tersebut (Todaro & Smith, 2011).

Salah satu tolok ukur pertumbuhan suatu negara dapat dilihat dari GDP (*Gross Domestic Product*) yang merupakan statistika perekonomian yang paling diperhatikan karena dianggap ukuran tunggal terbaik mengenai kesejahteraan rakyat. Hal yang mendasarinya tak lain karena GDP dapat mengukur dua hal pada saat bersamaan yaitu total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil perekonomian (Mankiw, 2004).

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (BPS, 2023).

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cenderung cepat dan tidak diimbangi dengan distribusi pendapatan yang merata akan menimbulkan ketimpangan. Hal ini menjadi penting dan dibutuhkan oleh setiap negara termasuk Indonesia, karena peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas dan distribusi pendapatan tidak akan terjadi tanpa adanya pertumbuhan (Rifa Maulidya, 2021).

Kuznet (2001) dalam Permana (2012), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

Grafik 1.2 Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah) Provinsi Riau



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2023

Pada grafik 1.2 di atas mendeskripsikan mengenai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Pertumbuhan ekonomi yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan salah satu faktor untuk melihat keberhasilan pembangunan disuatu daerah atau disuatu wilayah. Tingginya aktivitas barang dan jasa merupakan pernyataan atas tingginya pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data PDRB di Provinsi Riau memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi, yang mana tiap tahunnya mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2016 sebesar 458.769,34 milliar rupiah, lalu pada tahun 2017-2019 mengalami peningkatan 495.607,05 milliar rupiah, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 489.995,75 milliar rupiah, namun pada tahun 2021-2022 kembali meningkat sebesar 529.532,98 milliar rupiah.

Fluktuasi PDRB di Provinsi Riau dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi perekonomian global termasuk dampak dari pandemi COVID-19,

dapat berdampak besar pada perdagangan dan ekonomi provinsi. Pada tahun 2020, terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan PDRB di Provinsi Riau, karena banyak sektor usaha yang terdampak dan mengalami penurunan aktivitas. Selain itu, kebijakan pemerintah, dimana pembangunan dalam suatu lingkup tidak selalu adil, sehingga pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai belum mampu memberantas apa yang timbul akibat pembangunan yang tidak adil. Pada saat yang sama, di beberapa daerah, pertumbuhan ekonomi terjadi secara perlahan dan daerah tersebut tidak mengalami perkembangan dan kemajuan karena keterbatasan sumber daya. Terakhir adalah faktor internal di Provinsi Riau, dimana provinsi Riau memiliki ketergantungan yang signifikan pada sektor industri perkebunan, terutama kelapa sawit, yang merupakan komoditas ekspor utama. Harga dan permintaan internasional untuk kelapa sawit sangat berfluktuasi, yang dapat berdampak langsung pada PDRB provinsi. Kedua, fluktuasi harga minyak dan gas alam juga memengaruhi pendapatan provinsi, mengingat Riau adalah salah satu produsen minyak terbesar di Indonesia (BPS, 2022).

Jumlah penduduk ialah parameter dan hal penting dalam kegiatan ekonomi. Penduduk merupakan aset pembangunan yang dapat diberdayakan secara optimal. Meskipun begitu Jumlah penduduk dapat menjadi “beban” dalam pembangunan apabila pemberdayaannya tidak diiringi dengan kualitas jumlah penduduk yang memadai pada wilayah/daerah bersangkutan, dalam (Badan Pusat Statistik, 2009). Jumlah penduduk ini akan menjadi sebuah masalah bagi pemerintah jika tidak bisa dikendalikan, karena jika jumlah penduduk tiap tahunnya makin bertambah maka akan menyebabkan angka kemiskinan juga

tinggi. Pertumbuhan penduduk bisa mengurangi angka kemiskinan tergantung dari masyarakat yang mendapatkan pekerjaan dan bisa memenuhi kebutuhannya.

Grafik 1.3 Jumlah Penduduk (Juta Jiwa) Provinsi Riau



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2023

Jumlah penduduk Provinsi Riau sangat beragam dan bertambah. Provinsi Riau jumlah penduduk mengalami penurunan dan peningkatan tiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Jumlah Penduduk pada tahun 2016 sebesar 6.500.971 juta jiwa, namun pada tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 6.971.745 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk terbesar terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah penduduk 6.971.745 juta jiwa, lalu terjadi penurunan sebesar 6.394.087 juta jiwa pada tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor diantaranya angka kematian terdampak Covid-19 (Alamsya et al., 2023), terjadinya migrasi seumur hidup, serta penurunan total *fertility rate* (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2023). Namun

pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan sebesar 6.614.384 juta jiwa.

Fluktuasi jumlah penduduk Provinsi Riau dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti angka kelahiran, angka kematian, migrasi, dan kebijakan pemerintah layaknya program Keluarga Berencana. Cristiana et al., (2021) menyatakan bahwa Sasaran program Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Riau, yaitu menurunnya angka kelahiran total (TFR), meningkatnya prevelensi kontrasepsi modern (mCPR), menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need), meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (PAMKJP), dan menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi (Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, 2016-2019). Disamping itu, pada tahun 2020, terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan jumlah penduduk di Provinsi Riau, karena banyak orang yang meninggal dunia akibat Covid-19. Selain itu, terjadinya migrasi seumur hidup dan penurunan *total fertility rate* juga dapat mempengaruhi fluktuasi jumlah penduduk di Provinsi Riau.

Teori Malthus menyatakan bahwa “penduduk cenderung meningkat lebih cepat daripada persediaan makanan”. Begitu pula dari teori yang pernah dikemukakan oleh ahli yang lain seperti Adam Smith dan Benjamin Franklin. Yang dapat disimpulkan bahwa Penduduk tumbuh bagaikan deret ukur dan persediaan hitung, akibatnya sumberdaya bumi tidak mampu mengimbangi kebutuhan manusia yang terus bertambah dengan cepat. Hal itulah yang menimbulkan kemiskinan dan kesengsaraan.

Indikator lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan suatu daerah adalah kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. IPM merupakan tolak ukur pembangunan suatu wilayah sebaiknya berkorelasi positif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut karena diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan rendah.

Grafik 1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%) Provinsi Riau



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2023

Berdasarkan data BPS pada grafik 1.4, diatas mengindikasikan bahwasannya selama 7 Tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia persentasenya meningkat setiap tahunnya. Sejak tahun 2016-2019 terus

mengalami peningkatan. Hal ini dapat diperhatikan dari tahun 2016 IPM Provinsi Riau sebesar 71,20 persen meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2019 IPM Provinsi Riau meningkat hingga sebesar 73,00 persen. Namun Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Riau. IPM tahun 2020 tercatat sebesar 72,71 persen atau turun 0,40 persen dibanding tahun sebelumnya. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, pada tahun 2021 dan tahun 2022 peningkatan IPM Riau terus membaik seiring dengan penanganan Covid-19 yang berjalan baik dan pemulihan kinerja ekonomi Riau.

Fluktuasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah, ketersediaan sumber daya manusia, dan kondisi perekonomian. Realisasi belanja pemerintah di Provinsi Riau cenderung fluktuatif selama tahun 2016-2022, sedangkan nilai IPM Provinsi Riau cenderung naik setiap tahun, kecuali pada tahun 2020 di mana terjadi penurunan namun kembali naik di tahun berikutnya. Selain itu, pembangunan manusia juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap pekerjaan. Kualitas pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi IPM Provinsi Riau, karena pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, ketersediaan pelayanan kesehatan yang memadai juga dapat mempengaruhi IPM Provinsi Riau, karena kesehatan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akses terhadap pekerjaan yang baik juga dapat

mempengaruhi IPM Provinsi Riau, karena pekerjaan yang baik dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun menurut data tidak semua kabupaten dan kota di Provinsi Riau mengalami penurunan kemiskinan seiring dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut teori, peningkatan IPM berdampak negatif terhadap angka kemiskinan. Ini bukan kasusnya, hipotesis ini dikemukakan oleh Mudrajad yang menjelaskan bahwa IPM digunakan sebagai instrument untuk melihat kinerja perbaikan manusia antara negara dan daerah. Kesempatan penduduk suatu daerah untuk mengakses hasil-hasil pembangunan seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain, yang seharusnya dapat mengurangi jumlah penduduk miskin disebut dengan IPM.

IPM adalah tindakan untuk menilai pencapaian peningkatan manusia yang bergantung pada beberapa bagian utama dalam kepuasan pribadi. Pendekatan tiga dimensi mendasar digunakan untuk mengembangkan IPM, yang memperhitungkan kehidupan yang layak, tingkat pengetahuan yang tinggi, dan harapan hidup yang panjang dan sehat. Karena melibatkan berbagai faktor yang relevan, ketiga dimensi ini bermakna luas. Angka harapan hidup tiap kelahiran digunakan untuk menentukan dimensi kesehatan. Sementara itu, untuk mengukur aspek pengetahuan, kombinasi indikator seperti tingkat kemahiran dan durasi normal yang digunakan. Selain itu, untuk mengukur komponen-komponen kehidupan yang baik dipergunakan indikator daya beli individu atas keperluan pokok, dimana terlihat melalui konsumsi per kapita rata-rata sebagai cara untuk

mengatasi mencerminkan peningkatan pencapaian dalam mewujudkan kehidupan yang layak.

Empat hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pembangunan manusia adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995:12).

Dari berbagai macam penjelasan tersebut, maka penulis ingin meneliti dan mengkaji tentang hal-hal yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau terutama hubungannya dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia dengan judul:

“Analisis Pengaruh (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau (Tahun 2016-2022)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Terjadi fluktuasi pada Tingkat Kemiskinan Provinsi Riau dari tahun ketahunnya.
2. Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Riau mengalami fluktuasi penurunan dan peningkatan setiap tahunnya.
3. Jumlah Penduduk di Provinsi Riau mengalami penurunan dan peningkatan setiap tahunnya.
4. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau terus mengalami meningkat di Provinsi Riau.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup masalah dalam penelitian ini, maka dilakukan pembatasan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Penelitian ini menggunakan variabel Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia yang dapat mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau.
2. Data untuk variabel penelitian hanya diambil dari Badan Pusat Statistik di Provinsi Riau.
3. Data yang dipakai ialah data tahunan dalam kurun waktu 2016-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah, dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2016-2022?
2. Apakah terdapat pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2016-2022?
3. Apakah terdapat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2016-2022?
4. Apakah terdapat pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia secara simultan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2016-2022?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2016-2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2016-2022.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2016-2022.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan secara simultan di Provinsi Riau tahun 2016-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk penulis : penelitian ini sebagai pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan ilmu ataupun teori yang penulis dapatkan selama perkuliahan serta syarat untuk menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh.

2. Untuk akademisi : penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dan menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Tingkat Kemiskinan.
3. Untuk masyarakat : penelitian dapat memberikan wawasan mengenai faktor-faktor dan pengaruh dari PDRB, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau, sehingga masyarakat dapat menyiapkan diri dan mengambil langkah tepat untuk mengembangkan potensi diri dan merencanakan apa yang harus dipersiapkan dimasa mendatang.

